

Judul : Dorong pemenuhan fasilitas rumah sakit
Tanggal : Sabtu, 02 Juni 2012
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 3

Implementasi Undang-Undang BPJS Dorong Pemenuhan Fasilitas Rumah Sakit

JAKARTA - Komisi IX DPR akan mendorong pemenuhan fasilitas pendukung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) I. Dorongan itu dilakukan salah satunya melalui penganggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 2013.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf mengatakan, beroperasinya BPJS I per 1 Januari 2014 menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi persiapan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan secara nasional, termasuk ketersediaan tempat tidur kelas III. Dia menyebutkan, saat ini baru punya 114.000 tempat tidur dari sekitar 237.000 tempat tidur yang dibutuhkan. "Jadi masih kurang sekitar 123.000 tempat tidur untuk memenuhi semua kebutuhan yang ada," ungkap Nova di Jakarta kemarin.

Menurut politikus dari Demokrat itu, tahun ini Kemenkes berencana menambah 40.000 tempat tidur, 40.000 tempat tidur pada 2013, dan sisanya sebanyak 20.000 diren-



DOK SINDO

NOVA RIYANTI YUSUF

canakan pada 2014. Namun, tahun ini pemerintah hanya mampu menyediakan 10.121 tempat tidur. Jumlah tersebut dinilai masih kurang sekitar 29.879 tempat tidur dari yang ditargetkan sebanyak 40.000 tempat tidur. "Terkait kurangnya tempat tidur kelas III ini, Kemenkes berencana melakukan penambahan, tapi masih jauh dari target," ungkapnya.

Nova menjelaskan, banyaknya jumlah tempat tidur yang harus disediakan pemerintah sebelum beroperasinya BPJS I menyebabkan beban utang yang ditanggung semakin berat. Dia menyebutkan, jumlah tempat tidur yang harus di-

sediakan pemerintah sebelum 2014 sebanyak 100.000 tempat tidur. Karena itu, pihaknya akan mendorong pemenuhan tempat tidur dan sarana pendukung lainnya lewat penganggaran Kemenkes pada 2013, sekaligus mengawasi efektivitas dan efisiensi pemenuhan fasilitas.

Upaya mendorong pemenuhan fasilitas pendukung BPJS I lewat penganggaran, kata Nova, merupakan bentuk komitmen dan keberpihakan DPR dalam mendukung persiapan pelaksanaan BPJS I. Pelaksanaan BPJS I perlu persiapan yang matang sehingga nanti mampu memberikan pelayanan yang maksimal. "Selain mendorong lewat penganggaran yang berpihak pada BPJS I, kami juga akan mengawasi efektivitas dan efisiensi pemenuhan tempat tidur dan sarana pendukung lainnya," tandasnya.

Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi PPP Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, pihaknya akan terus mendorong pemerintah

agar segera memenuhi fasilitas pendukung BPJS I sesuai kebutuhan pelayanan yang ada. Dia bahkan meminta pemerintah untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan sesuai ketentuan dalam UU Kesehatan. "Dalam UU Kesehatan dikatakan bahwa persentase anggaran untuk kesehatan minimal 5% dari APBN. Sementara saat ini baru dipenuhi sekitar 2%," kata Irgan.

Menurut dia, pemerintah tidak akan kesulitan memenuhi kebutuhan fasilitas pendukung BPJS I jika alokasi untuk kesehatan sesuai ketentuan UU Kesehatan. Karena itu, pihaknya berjanji akan mendorong pemenuhan fasilitas pendukung BPJS I melalui penganggaran APBN 2013. Namun, pelaksanaan BPJS I per 1 Januari 2014 tidak bergantung pada ada dan tidaknya penambahan anggaran di kesehatan. "Kami minta pemerintah memperhatikan itu karena 2014 harus beroperasi," tuturnya.

● andi setiawan

DPR Happy Subsidi Energi 2027 Meningkat

Jaga Daya Beli Masyarakat, Perkuat Ketahanan Energi

Senayan mendukung penambahan alokasi subsidi energi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Kebijakan tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan energi, dan menghadirkan pembangunan yang berkeadilan.

ANGGOTA Komisi XII DPR Beniyanto Tamoreka mengatakan, subsidi energi merupakan instrumen penting negara untuk melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas ekonomi. Karena itu, pelaksanaannya mesti benar-benar tepat sasaran, transparan, dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

"Kebijakan subsidi juga perlu mempertimbangkan perbedaan kondisi infrastruktur, pola konsumsi, dan kemampuan ekonomi masyarakat di setiap daerah," ujar Beniyanto di Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Sebelumnya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan subsidi listrik 2027 sebesar Rp 117,84 triliun, meningkat dari Rp 100,83 triliun pada APBN 2026. Pemerintah juga mengusulkan peningkatan volume solar ber-

subsidi dari 18,64 juta menjadi 19 juta kiloliter serta minyak tanah bersubsidi dari 0,53 juta menjadi 0,561 juta kiloliter.

Beniyanto melanjutkan, penambahan volume minyak tanah bersubsidi mencerminkan perhatian Pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di Indonesia Timur, termasuk Papua, Maluku, dan sebagian Sulawesi. Ketepatan penyaluran subsidi bergantung pada kualitas data kependudukan.

Karena itu, Kementerian ESDM perlu memperkuat sinkronisasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Termasuk, data sosial-ekonomi Pemerintah, serta data pelanggan dan transaksi yang dikelola Perusahaan Listrik Negara PLN maupun Pertamina.

Penyempurnaan, lanjut dia, perlu

dilakukan secara berkala agar perubahan demografi, susunan keluarga, dan kondisi ekonomi masyarakat dapat segera tercatat. Karena anggaran yang besar tidak akan efektif apabila data penerima tidak akurat. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak menerima subsidi, sementara kelompok yang mampu masih ikut menikmati. "Integrasi data perlu disertai mekanisme koreksi, perlindungan data pribadi, dan saluran pengaduan yang mudah diakses masyarakat," tegas politisi Golkar ini.

Dengan itu, Beniyanto mendukung kebijakan Presiden Prabowo dan langkah Menteri ESDM Bahlil dalam menjaga keterjangkauan energi sekaligus memperkuat kemandirian nasional. "Kami (Komisi XII DPR) akan mengawal agar subsidi energi 2027 tidak mengalami kebocoran, tepat sasaran, dan benar-benar menghadirkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia," tandas legislator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) tersebut.

Anggota Komisi XII DPR Bambang Patijaya menambah-

kan, percepatan energi baru dan terbarukan (EBT) perlu ditempatkan sebagai strategi nasional untuk memperkuat ketahanan energi, mengendalikan beban subsidi, serta membangun industri teknologi energi di dalam negeri. Karena itu, pihaknya mendukung arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mempercepat kemandirian energi nasional.

"Pengembangan EBT bukan hanya agenda lingkungan, tetapi juga instrumen untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan menjaga kesehatan fiskal negara," kata Bambang di Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Selain itu, ia menyoroti perhitungan Kementerian ESDM terkait beban subsidi dan kompensasi energi pada 2026 berpotensi mencapai sekitar Rp300 triliun. Hal itu terjadi apabila ketersediaan pasokan di Indonesia tidak diantisipasi dan pemanfaatan EBT tidak dipercepat. "Proyeksi tersebut perlu menjadi dasar untuk mempercepat diversifikasi energi secara terukur," dorong Bambang.

Diketahui, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, Pemerintah merencanakan tambahan kapasitas sebesar 69,5 Giga-Watt (GW), dengan 42,6 GW atau sekitar 61 persen berasal dari EBT. Program PLTS 100 GWp yang diluncurkan Presiden Prabowo diperkirakan menghasilkan daya rata-rata efektif sekitar 18-20 GW dengan asumsi faktor kapasitas 18-20 persen. Secara ilustratif, apabila tambahan pasokan tersebut diperhitungkan dalam struktur perencanaan baru, porsi EBT berpotensi meningkat menjadi sekitar 69-70 persen.

Karena itu, harap Bambang, dengan hadirnya Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp, tentu RUPTL mengalami penyesuaian. Penyesuaian itu bukan hanya mengubah angka kapasitas, tetapi juga mencakup komposisi pembangkit, tahapan pembangunan, lokasi proyek, kebutuhan transmisi, kapasitas baterai, cadangan daya, serta kemampuan sistem menyerap tambahan pasokan tenaga surya. ■ TIF